

PERTUMBUHAN

EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI ACEH, 2005-2014¹

ECONOMIC GROWTH AND INCOME DISPARITIES OF DISTRICT/CITY IN ACEH, 2005-2014

Ervina Yunita²

Email : vina_mat04@gmail.com

ABSTRACT

Economic growth in Aceh province as an aggregate is continuously increasing during the period of 2005 to 2014. The differences of interregional economic growth in Aceh province indicate the disparity of income. The income disparities among regions causing problems of development and economic instability. This study aims to analyze the magnitude of disparities between regions and economic growth in counties/cities and to classify areas in Aceh province based on their growth rate and per capita income/contribution. The analytical method used is the analysis of economic growth, typology Klassen, Williamson index. These results explain that there are some areas in Aceh that are in relatively remote areas. Income disparities between regions in the province of Aceh in 2005-2014 is considered low (<0.5) and has a tendency to increase.

Key words: *Income disparities, economic growth, Klassen typology*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Aceh secara keseluruhan terus mengalami peningkatan selama tahun 2005 hingga 2014. Perbedaan pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Propinsi Aceh mengindikasikan adanya disparitas pendapatan. Disparitas pendapatan antar daerah dapat menyebabkan permasalahan pembangunan dan ketidakstabilan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta mengklasifikasi daerah di Provinsi Aceh berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya/kontribusinya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, tipologi kelas, indeks Williamson. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih ada beberapa daerah di Aceh yang tergolong dalam daerah relatif tertinggal. Disparitas pendapatan antar daerah di Propinsi Aceh tahun 2005-2014 tergolong rendah (< 0,5) dan mengalami kecenderungan meningkat.

Kata kunci : Disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tipologi kelas

¹ Naskah diterima 1 Desember 2016. Direvisi 7 Desember 2016.

² Peneliti Pertama pada PKP2A IV LAN-RI.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya, dengan cara mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut. Pembangunan daerah lebih lanjut dituangkan dalam program-program kerja penyelenggaraan pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk menyelenggarakan program pembangunan tersebut, daerah diberikan kewenangan dan keleluasan untuk mengurus dan mengelola kebijakan-kebijakan pembangunan di daerahnya sehingga daerah diharapkan lebih mandiri, berkeadilan dan demokratis dalam mengurus dan mengolah sumber daya, menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal (memungut pajak, retribusi, dan melakukan belanja), serta menentukan arah pembangunan di segala sektor, baik terhadap aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, politik, dan sebagainya yang menjadi kewenangan dan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian dengan adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga memungkinkan terjadinya disparitas pembangunan antar daerah sebagaimana diidentifikasi oleh Prud'Homme, "bahwa salah satu "kerugian" dari pelaksanaan desentralisasi yaitu makin

tingginya disparitas pembangunan antar daerah, karena dipengaruhi dengan kewenangan dan potensi sumber daya daerah".

Untuk Provinsi Aceh, secara formal berlaku status otonomi khusus yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh selain mendapatkan dana perimbangan migas dan non migas, juga mendapatkan dana otonomi khusus untuk jangka waktu 20 tahun, yang mulai berlaku sejak tahun 2008 sampai dengan 2028. Selain menerima dana otonomi khusus, Aceh juga menerima manfaat dari dana penyelenggaraan desentralisasi.

Aceh adalah provinsi terkaya ketiga dari segi pendapatan per kapita setelah Papua dan Kalimantan Timur sungguh ironis bahwasanya Aceh masih menempati peringkat keempat provinsi termiskin di Indonesia. Berdasarkan laporan The World Bank, pada tahun 2004 diperkirakan 1,2 juta penduduk Aceh (28,5 persen total penduduk) hidup di bawah garis kemiskinan (Rp.130.000,- atau sekitar AS\$14 per kapita per bulan). Dengan demikian, tingkat kemiskinan di Aceh hampir dua kali lipat tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia (16,7 persen). Sebesar 13 persen penduduk Aceh lainnya menjadi rentan terhadap kemiskinan setelah bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004, menyebabkan kerugian dan kerusakan parah terhadap Aceh, baik dalam hal ekonomi maupun kemanusiaan. Oleh karena itu Aceh mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah selama hampir tiga dekade terakhir, tertinggal dibelakang Indonesia dan Sumatra Utara hampir setiap tahun. Alasan utama pertumbuhan yang

lambat tersebut adalah konflik yang berlangsung lama yang berdampak buruk pada provinsi ini, meskipun ketertinggalan ekonomi secara struktural juga berkontribusi terhadap kinerja ekonomi yang buruk.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan serta laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Masli dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Regional antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami fluktuasi dan menunjukkan arah negatif jika dibandingkan pada awal penelitian. Menurut tipologi Klassen, pada umumnya kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal. Berdasarkan hasil indeks Williamson dan indeks Entropi Theil kesenjangan antar kabupaten/kota meningkat.

Cholif dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007". Hasil penelitian menunjukkan

sektor ekonomi yang unggul di Jawa Tengah adalah sektor pertanian. Menurut tipologi Klassen, pada umumnya kabupaten/kota di Tengah termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal. Berdasarkan hasil indeks Williamson dan indeks Entropi Theil kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami ketimpangan yang tinggi karena berada di atas ambang 0,5.

Pemahaman terhadap ketimpangan akan menjadi lebih komprehensif, bila dilakukan dalam suatu kurun waktu, agar dapat diketahui apakah ketimpangan yang terjadi semakin membesar (divergen) atau semakin mengecil (konvergen). Penelitian ini akan mengetengahkan analisis tentang pertumbuhan ekonomi dan klasifikasinya serta ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijaksanaan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada kabupaten/kota sesuai kondisi alamnya yang dapat dikembangkan.

2. Rumusan Masalah

Kesenjangan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Aceh. Adanya perbedaaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan wilayah di Aceh akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota, yang pada akhirnya justru akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata justru akan semakin menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.

Berdasarkan uraian di atas maka, pertanyaan penelitian yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasinya menurut

kabupaten/kota di Aceh?

2. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasinya menurut kabupaten/kota di Aceh.
2. Analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Aceh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori/Konsep

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti dan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. Jadi

pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Todaro dan Smith menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Kuncoro, menyatakan bahwa kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat.

Adapun faktor-faktor penyebab kesenjangan pembangunan ekonomi menurut Emilia dan Imelia antara lain:

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah: ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat dibandingkan dengan daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah.
- b. Alokasi investasi: rendahnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan kegiatan ekonomi yang produktif.
- c. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah: kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar provinsi merupakan penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi regional.
- d. Perbedaan sumber daya alam antarwilayah: pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam.
- e. Perbedaan kondisi demografis antarwilayah: jumlah populasi yang besar dengan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin yang

tinggi, etos kerja tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

- f. Kurang lancarnya perdagangan antarwilayah: tidak lancarnya arus barang dan jasa antardaerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui sisi permintaan dan sisi penawaran.

2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sutarno dan Kuncoro dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode pengamatan 1993- 2000, terjadi kecenderungan peningkatan kesenjangan, baik di analisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks Entropy Theil. Berdasarkan tipologi daerah, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok. Dalam penelitian ini hipotesis kurva U-terbaliknya Kuznets berlaku di Kabupaten Banyumas. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis korelasi Pearson antara pertumbuhan PDRB dengan indeks Williamson dan indeks Entropy Theil, didapatkan bahwa ada korelasi yang kurang kuat.

Arifin dalam laporan penelitiannya yang berjudul "Pertumbuhan, Sektor Unggulan, Kesenjangan dan Konvergensi Antar Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo". Hasil penelitian menunjukkan sektor Masih adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda antar kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dari analisis LQ diperoleh hasil beberapa kecamatan memiliki sektor unggulan yang sedikit sedangkan kecamatan yang lain memiliki sektor unggulan yang lebih banyak. Dari analisis ketimpangan dapat dihitung indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropi menunjukkan angka

indeks ketimpangan PDRB per kapita antarkecamatan di Kabupaten Sidoarjo 2004-2005 yaitu 0,3337 untuk indeks Williamson dan 0,2311 untuk indeks entropi Theil. Dari analisis konvergensi terlihat bahwa dispersi pertumbuhan ekonomi tingkat kecamatan mengalami peningkatan. Untuk koefisien variasi meningkat dari 60,957 menjadi 97,911. Sedangkan standard deviasi meningkat dari 7,808 menjadi 9,895.

Caska dan Riadi melakukan penelitian yang berjudul "Pertumbuhan dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau". Analisis data yang digunakan antara lain analisis tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks Entropi Theil, dan kurva U terbalik. Selama periode pengamatan 2003- 2005, terjadi kesenjangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kesenjangan antarwilayah di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2005-2014. Indeks Williamson dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antarwilayah. Adapun tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari 18 kabupaten yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan 5 kota yaitu: Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian

deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS Aceh.

3. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2005-2014, digunakan rumus:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Keterangan:

- PDRB_t = PDRB pada tahun t
- PDRB_{t-1} = PDRB pada tahun (t-1)

a. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

- i. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah.
- ii. Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata.
- iii. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata.
- iv. Daerah relatif tertinggal (*low growth and*

low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen

Laju Per-tumbuhan (r) \ PDRB per Kapita (y)	yi > y	yi < y
	ri > r	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh
ri < r	Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal

Keterangan:

- ri = laju pertumbuhan PDRB di kabupaten i
- yi = Pendapatan perkapita kabupaten i
- r = Laju pertumbuhan rata-rata PDRB Aceh
- y = Pendapatan perkapita rata-rata Aceh

b. Index Williamson

Untuk mengetahui disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi di Aceh, maka dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 f_i / n}{\bar{y}}}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
 - yi = pendapatan per kapita di kabupaten i
 - y = pendapatan per kapita rata-rata Provinsi Aceh
 - fi = jumlah penduduk di kabupaten i
 - n = jumlah penduduk Provinsi Aceh
- Dengan kriteria hasil uji indeks $0 < Iw < 1$ sebagai berikut:
- a. 0-0,5 = indeks disparitasnya rendah.
 - b. 0,5-1 = indeks disparitasnya tinggi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah
 Berdasarkan data yang diperoleh maka ini:
 laju pertumbuhan ekonomi Aceh dari tahun

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi periode Tahun 2005-2010 Provinsi Aceh

No.	Kabupaten /Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)										Rata-rata Pertumbuhan
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Simeulue	0,73	20,68	5,77	8,76	5,19	6,94	4,28	5,32	5,41	4,93	6,80
2.	Aceh Singkil	3,90	19,75	4,92	4,59	4,75	4,97	5,03	5,01	5,08	4,08	6,21
3.	Aceh Selatan	3,76	4,13	6,14	3,64	2,00	4,19	4,47	4,56	4,27	4,49	4,16
4.	Aceh Tenggara	8,60	50,31	6,99	3,59	4,78	5,29	5,52	5,41	5,02	3,71	9,92
5.	Aceh Timur	10,73	33,92	41,11	2,56	3,09	4,00	5,01	4,82	4,22	70,48	2,68
6.	Aceh Tengah	10,38	14,49	5,92	4,69	4,03	4,32	4,93	4,38	5,20	4,23	6,26
7.	Aceh Barat	13,15	9,94	11,95	5,46	5,00	5,04	5,18	5,03	5,22	3,38	4,31
8.	Aceh Besar	61,10	8,23	13,68	5,86	5,77	4,81	4,66	4,61	4,44	4,11	11,72
9.	Pidie	3,26	28,69	2,73	4,52	4,66	4,38	4,49	4,54	4,62	4,06	6,59
10.	Bireuen	2,49	14,99	9,50	5,63	5,30	4,90	5,30	5,59	4,66	2,44	6,08
11.	Aceh Utara	-5,43	14,01	3,70	3,67	3,37	3,70	3,70	3,85	3,17	-2,48	3,13
12.	Aceh Barat Daya	2,58	5,24	4,57	4,52	4,44	4,92	5,14	5,25	5,10	1,02	4,28
13.	Gayo Lues	4,32	24,87	4,08	4,82	4,77	5,19	4,66	4,98	4,58	4,18	6,65
14.	Aceh Tamiang	5,48	0,99	2,38	1,97	2,86	2,04	4,41	5,36	5,72	1,98	3,32
15.	Nagan Raya	-3,89	4,27	5,49	3,63	3,46	4,12	4,69	5,08	6,63	2,51	3,60
16.	Aceh Jaya	33,87	11,26	2,95	4,24	4,13	4,61	4,45	4,15	4,29	4,18	1,04
17.	Bener Meriah	2,10	3,83	4,24	3,67	4,47	5,51	5,11	5,28	4,75	4,42	4,34
18.	Pidie Jaya	0,00	0,00	5,06	5,26	5,32	5,38	5,35	5,63	3,84	3,52	4,92
19.	Banda Aceh	1,62	44,45	19,00	5,64	5,68	5,94	6,02	6,17	6,12	5,10	10,57
20.	Sabang	4,63	51,25	7,32	4,40	4,72	5,26	3,46	4,24	4,48	3,99	9,37
21.	Langsa	3,92	4,70	4,06	3,93	4,64	4,91	4,30	4,57	4,79	4,43	4,42
22.	Lhokseumawe	5,45	10,75	12,11	6,39	5,66	5,88	3,62	3,91	3,09	78,29	4,86
23.	Subulussalam	0,00	0,00	4,12	4,86	4,94	4,83	5,67	5,89	6,03	5,56	4,19

Sumber: BPS, PDRB 2005-2014, diolah

Laju pertumbuhan PDRB perkapita di tiap kabupaten/kota di Propinsi Aceh dari 2005-2014 setiap tahunnya berbeda-beda. Tahun 2005 pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Simeulue sebesar 61,10% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Aceh Utara sebesar -5,43%. Tahun 2010, adalah Kabupaten Simeulue sebesar 6,94% merupakan yang tertinggi dan Kabupaten Aceh Utara sebesar 3,70% merupakan yang terendah. Pertumbuhan yang tertinggi pada Tahun 2014 adalah Kota Subulussalam sebesar 5,51% dan yang terendah adalah di Kota Lhokseumawe sebesar -8,29%. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita dari tahun 2005 hingga 2014 yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Besar sebesar 11,72% setiap tahunnya. Kabupaten Aceh Jaya merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan PDRB perkapita terendah yaitu rata-rata hanya tumbuh sebesar 1,04% setiap tahunnya. Perincian laju pertumbuhan PDRB perkapita tiap kabupaten/kota di Propinsi Aceh tahun 2005-2014 sendiri pun berbeda-beda, dapat dilihat di Tabel 2.

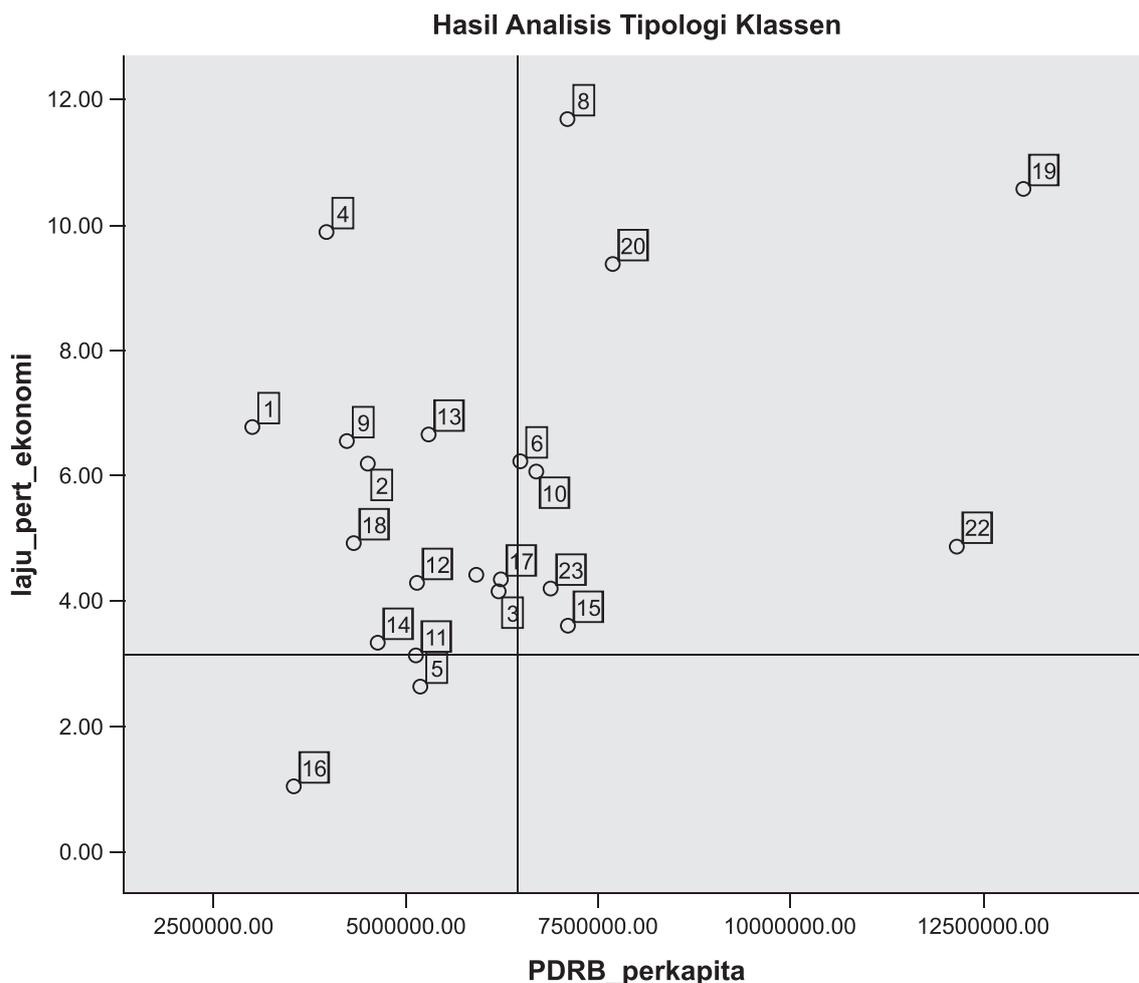
1. Analisis Tipologi Klassen

Dari tabel hasil analisis tipologi klassen di atas terlihat bahwa masih adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda antar kabupaten/kota di Aceh. Beberapa kabupaten masuk ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah cepat berkembang serta daerah relatif tertinggal. Akan tetapi, tidak ada satupun kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang termasuk dalam daerah maju tapi tertekan.

Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan tumbuh karena memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Aceh. Pada periode tahun 2005-2014, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 10,57% dan tingkat pendapatan perkapita sebesar Rp.13.036.366,29. Sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh adalah 3,137% sedangkan pendapatan perkapita sebesar Rp.6.454.610. Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah yang berada di klasifikasi Daerah relatif tertinggal, memiliki rata-rata pertumbuhan

Tabel 3. Klasifikasi kab/kota Provinsi Aceh

Laju PDRB per Kapita (y) Pertumbuhan (r)	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh: Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Bireuen Kab. Nagan Raya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam	Daerah Berkembang Cepat: Kab. Pidie Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tamiang Kota Langsa Kab. Pidie Jaya Kab. Gayo Lues Kab. Bener Meriah Kab. Simeulue Kab. Aceh Singkil
$r_i < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan	Daerah Relatif Tertinggal: Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Jaya



Grafik 2. Hasil Analisis Tipologi Klassen menggunakan SPSS

ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh. Selama periode 2005-2014, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Jaya adalah 1,04% dan pendapatan perkapita sebesar Rp.3.558.276,15. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh utara adalah sebesar 3,130% dan pendapatan perkapita sebesar Rp.5.150.270,73. Kabupaten Aceh Timur, tingkat pertumbuhan ekonominya adalah 2,68% dengan pendapatan perkapita Rp.5.189.232,79.

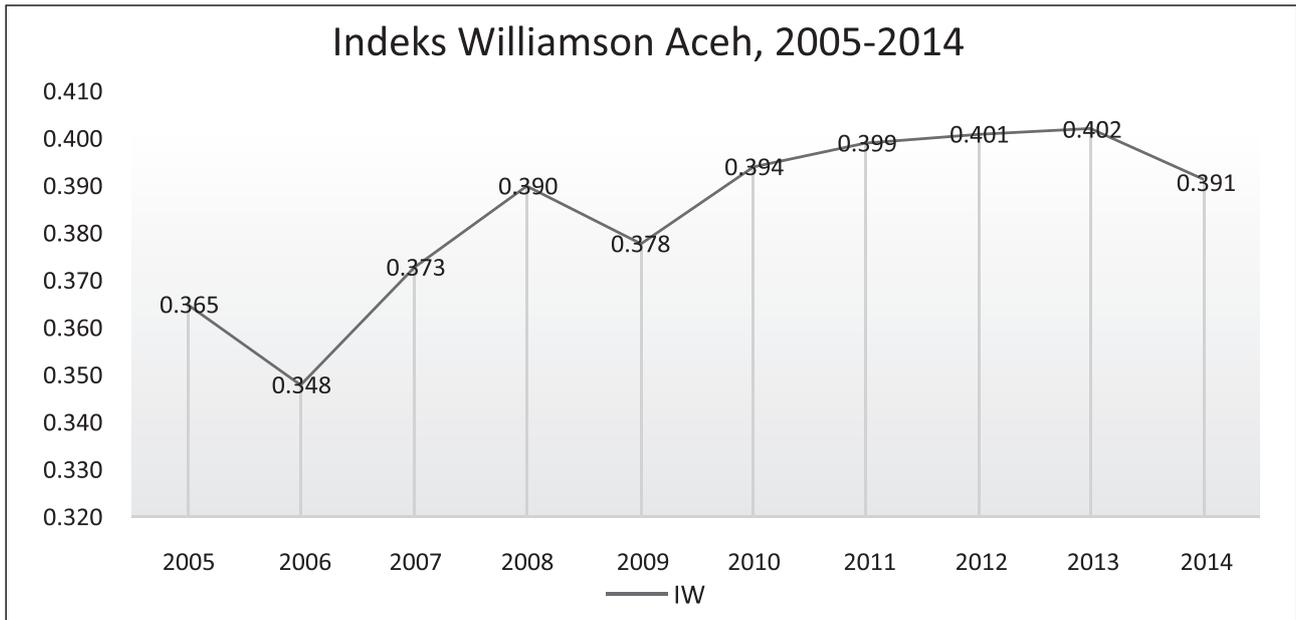
Oleh karena itu adanya penanganan yang lebih serius dari Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang relatif tertinggal agar bisa sejajar dengan pertumbuhan kabupaten lain yang lebih maju baik dari pertumbuhan maupun pendapatan perkapita.

2. Analisis Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil olahan data PDRB maka diperoleh Index Williamson sebagai berikut:

Tabel 4. Index Williamson dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Tahun	Index Williamson	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2005	0,365	2,32
2006	0,348	4,54
2007	0,373	0,26
2008	0,390	2,31
2009	0,378	2,31
2010	0,394	2,36
2011	0,399	2,84
2012	0,401	3,91
2013	0,402	3,26
2014	0,391	4,13



Grafik 2. Hasil Analisis Index Williamson Aceh, 2005-2014

Tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh yang dihitung menggunakan indeks ketimpangan Williamson selama sepuluh tahun pengamatan mengalami fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat. Nilai Indeks williamson tahun 2005 sebesar 0,365, mengalami penurunan di tahun 2006 tetapi tidak terlalu signifikan, kemudian meningkat menjadi 0,390 di tahun 2008. Ketimpangan provinsi Aceh secara terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2010 dengan nilai 0,394 menjadi 0,402 di tahun 2013 Hal ini berarti bahwa di Aceh telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota pada tingkat level rendah, ditunjukkan dengan besarnya indeks Williamson yang berkisar antara 0 – 0,5.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa olah data menggunakan alat analisis menyimpulkan bahwa kondisi perekonomian di kabupaten/kota di Propinsi Aceh sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama periode penelitian

mengalami fluktuatif, dikarenakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di Kabupaten/kota di Aceh. Pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Propinsi Aceh menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa masih ada kabupaten/kota di Propinsi Aceh selama tahun 2005-2014 yang merupakan daerah relatif tertinggal (termasuk dalam kuadran IV). Kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

b. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh dianalisis menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Hasilnya yaitu bahwa Indeks Williamson menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Aceh dari tahun 2005 – 2014 meskipun ketimpangan yang terjadi masih tergolong rendah karena berada diantara 0 – 0,5.

2. Rekomendasi

Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam menangani pembangunan dari daerah yang relatif tertinggal agar bisa sejajar dengan pertumbuhan daerah lain yang lebih maju baik dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita dengan asas pemerataan distribusi pendapatan. Tingginya disparitas pendapatan antar wilayah cenderung disebabkan pada daerah yang termasuk dalam kuadran I. Maka dari itu pemerintah daerah harus lebih serius untuk menangani disparitas pendapatan dengan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal (daerah pada kuadran 4) tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal. (2007). *"Pertumbuhan, Sektor Unggulan, Kesenjangan dan Konvergensi Antar Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo"*. Naskah Publikasi Penelitian Pengembangan IPTEK. Fakultas Ekonomi. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: PBFU-Universitas Gadjah Mada.

Caska dan Riadi. 2005. *"Pertumbuhan dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau"*. FKIP. Riau: Universitas Riau.

E. Koswara. 2003. *"Teori Pemerintahan Daerah"*. Jakarta: IIP Press.

Emilia dan Imelia. 2006. *"Modul Ekonomi Regional"*. Fakultas Ekonomi. Jambi: Universitas Jambi.

Isnowati, Sri. 2007. *"Pengujian Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah"*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi 14 (1).

Kuncoro, M. dan Sutarno (2000). *"Pertumbuhan Ekonom Dan Ketimpangan Kecamatan Antara Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000"*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 8 (2): 97-110.

Masli, Lili. 2009. *"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Regional antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat"*.

Nugraha, R.Aga. 2007. *"Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah di Provinsi Bali Pasca Tragedi Bom"*. Denpasar: Bank Indonesia.

Sjafrizal. 1997. *"Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat"*. Prisma, LP3ES, Nomor 3, 27-38.

The World Bank. 2006. *Analisis Pengeluaran Publik Aceh-Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta.

Wicaksono, Cholif Prasetyo. 2010. *"Analisis Disparitas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah"*. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.